

Perkembangan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia

Mirah Pertiwi

Prodi Ilmu Komunikasi, Telkom University

Corresponding author: mpertiwi@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Runtuhnya Orde Baru di Indonesia ditandai dengan kerusuhan yang meresahkan kemanusiaan. Kerusuhan Mei 1998 mencerminkan stereotip dan sentimen anti-Cina di antara masyarakat Indonesia. Setelah 23 tahun sejak tragedi tersebut, isu rasisme masih mewarnai Indonesia sampai sekarang. Artikel ini membahas mengenai penyebab sentimen anti-Tionghoa, dilihat dari sisi sejarah. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari artikel ini menunjukkan sentimen terhadap keturunan Tionghoa mengakar sejak penjajahan belanda yang terjadi berabad-abad lalu. Sentimen tersebut diperkuat dengan regulasi-regulasi diskriminatif di era Orde Baru. Pasca tragedi Mei 1998, ditambah dengan runtuhnya rezim Orde Baru, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa berubah, diiringi dengan regulasi-regulasi yang memastikan kesempatan setara bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang etnis, agama, atau ras. Meski begitu, isu bernuansa rasisme masih terjadi sampai sekarang.

Keywords: Sentimen anti-Tionghoa, Kerusuhan Mei 1998, Sejarah Diskriminasi Tionghoa.

PENDAHULUAN

Kerusuhan Mei 1998 merupakan masa kelam bangsa Indonesia dan dunia. Kejadian tersebut merenggut lebih dari seribu jiwa penduduk keturunan Tionghoa di Indonesia dan merusak ribuan rumah dan toko yang dimiliki keturunan Tionghoa di Indonesia, dan lebih dari seratus wanita keturunan Tionghoa diperkosa dalam beberapa hari selama tragedi itu berlangsung (Herlijanto, 2004; Turner & Allen, 2007). Meski grup etnis lain juga ada yang menjadi korban, komunitas Tionghoa dan non-Tionghoa memandang tragedi tersebut sebagai kerusuhan etnis (Herlijanto, 2004).

Menurut Horowitz (2001), kerusuhan etnis merupakan serangan sengit dari satu grup etnis ke grup etnis lain karena identitasnya. Sebuah kerusuhan etnis memang terlihat seperti tidak direncanakan. Namun, sebenarnya memiliki pola dan “dipicu oleh beberapa kejadian yang kemudian dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Kerusuhan etnis bukanlah fenomena acak” (Horowitz, 2001, p. 1), begitu pula dengan tragedi Mei 1998. Peristiwa ini merupakan manifestasi dari sentimen negatif terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia.

Tragedi Mei 1998 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang menerpa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan berakhir dengan keruntuhan rezim Orde Baru (Aguilar, 2001). Setelah 23 tahun berselang sejak kejadian tersebut, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia belum juga usai. Masyarakat Indonesia masih memiliki prasangka terhadap warga keturunan Tionghoa (Himawan, 2020; Setijadi, 2017). Berbagai insiden rasisme masih terjadi (Kristiono, 2018), seperti kekerasan bernuansa etnis di Jakarta. Korban, Andrew Budikusuma yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, diserang di dalam bus

Transjakarta (Pratama, 2016). Insiden bernuansa rasisme juga terjadi di Sumatera Utara. Dua vihara dan lima klenteng di Tanjung Balai dijarah dan dibakar sebagai bentuk balasan dari keluhan warga keturunan Tionghoa, Meliana, mengenai kerasnya suara adzan Maghrib dari sebuah mesjid di depan rumahnya (Destrianita, 2016). Kasus ini ditutup dengan ditangkapnya delapan penjarah dan pembakar vihara dan klenteng dengan hukuman kurang dari 3 bulan penjara, sedangkan Meliana dihukum 18 bulan penjara dengan alasan penistaan agama (Saputra, 2018). Kejadian ini mendapat sorotan dunia (Human Rights Watch, 2020).

Sentimen negatif terhadap Tionghoa juga merambah dunia politik. Pada pemilihan presiden 2014, capres Joko Widodo disebut sebagai keturunan Tionghoa dan bernama Wie Jo Koh (Januru, 2016). Isu bernuansa Tionghoa juga muncul pada pemilu 2019, dengan tersebarnya *hoax* yang menyebutkan bahwa “Partai Komunis Indonesia (PKI) bekerjasama dengan Partai Komunis Cina untuk memenangkan Presiden 01, dan telah membayar Ketua KPU” (Kominfo, 2019).

Sentimen negatif terhadap warga negara keturunan Tionghoa berpotensi dalam menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Jika diabaikan, maka tidak mustahil tragedi Mei 1998 terulang kembali. Oleh sebab itu, perlu pembahasan mengenai asal prasangka tersebut dan perkembangannya. Artikel ini fokus pada penyebab sentimen anti-Tionghoa di Indonesia, dilihat dari sisi sejarah. Pembahasan berdasarkan literatur nasional maupun internasional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review* dengan pendekatan kualitatif. Literatur yang digunakan berupa jurnal, buku, berita di media massa online tier 1, dan laporan/berita dari lembaga resmi nasional maupun internasional. Pencarian menggunakan mesin pencari seperti Wiley Online Library, Taylor & Francis Online, dan JSTOR. Sedangkan untuk laporan/berita dari lembaga resmi nasional dan internasional, serta berita di media massa online menggunakan mesin pencari Google. Studi literatur dipergunakan untuk menelusuri penyebab dan perkembangan sentimen negatif terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Penyebab sentimen anti-Tionghoa di Indonesia

Aguilar (2001) berpendapat bahwa “diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa merupakan produk ideologi dari proses sosial historis di Indonesia, terutama saat membangun negara [setelah meraih kemerdekaan]” (p. 505). Maka, penyebab sentimen anti-Tionghoa berawal pada abad ke-17 ketika Belanda menjajah Indonesia. Penjajah Belanda membagi masyarakat Indie (sebutan Indonesia saat itu) menjadi tiga kategori: Eropa sebagai ras tertinggi, Tionghoa dan “Oriental Asing” lain sebagai ras kelas dua, dan pribumi sebagai ras terendah (Chua, 2004; Elson, 2005). Kemudian ras Tionghoa mendominasi sektor perbankan dan mendirikan berbagai bisnis monopoli (Turner & Allen, 2007). Belanda mendukung hal tersebut, dan bahkan mengeluarkan kebijakan dengan

menunjuk “etnis Tionghoa untuk mengumpulkan pajak dan menjalankan bisnis kolonial” (Giblin, 2003, pp. 354-355). Alhasil mereka menjadi masyarakat eksklusif.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945, kesenjangan sosial dan ekonomi antara keturunan Tionghoa dengan pribumi menyebabkan Presiden Soekarno berusaha untuk membangun negara yang terdiri dari masyarakat pribumi dan memisahkan etnis lain (Chua, 2004). Selain itu, kesenjangan tersebut menimbulkan seterotip pada keturunan Tionghoa di Indonesia, seperti “arogan... cenderung eksklusif, mereka memisahkan diri dengan tinggal di area *real estate* dan tidak terlibat dalam aktivitas di lingkungan sekitar” (Tan, 1991, p. 123).

Banyak pribumi percaya bahwa warga etnis Tionghoa terlalu serakah dan ambisius. Mereka hanya ingin membuat dirinya sekaya mungkin dan hanya peduli dengan golongannya sendiri (Giblin, 2003; Tan, 1991; Setijadi, 2017). Mereka beranggapan etnis Tionghoa lebih sejahtera dan dominan secara ekonomi, serta memiliki kehidupan yang lebih mudah dibandingkan pribumi (Setijadi, 2017).

Keturunan Tionghoa juga memiliki stereotip terhadap pribumi. Mereka jarang diminta secara personal untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti siskamling atau kerja bakti, tapi mereka sering diharapkan untuk menyediakan makanan ringan dan minuman (Giblin, 2003). Itulah sebabnya mereka menganggap pribumi pemalas, sering meminta uang dari keturunan Tionghoa, dan terkadang dengan ancaman (Tan, 1991). Berbagai stereotip ini mengakibatkan perpecahan yang semakin besar antara etnis Tionghoa dan pribumi.

Sejarah sentimen anti-Tionghoa di Indonesia

Pendatang dari Cina pertama kali tiba ke Indonesia pada abad ke-5 dan menetap (Purdey, 2006; Taylor, 2005). Generasi sekarang merupakan warga negara Indonesia, lahir di Indonesia, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, memiliki nama Indonesia, dan beberapa di antaranya belum pernah berada di luar Indonesia (Chua, 2004; Turner & Allen, 2007). Namun sebagian besar warga pribumi masih menyebut mereka Orang Cina, istilah yang secara resmi diperkenalkan pada 1967 oleh pemerintah dan memiliki konotasi negatif (Aguilar, 2001; Chua, 2004; Giblin, 2003; Suryadinata, 1997; Turner & Allen, 2007). Kekerasan berbasis rasisme terhadap keturunan Tionghoa memiliki sejarah panjang, bahkan lebih lama dari umur Indonesia sendiri (Mohammad, 2009).

Era Penjajahan Jepang (1942-1945)

Sejarah sentimen anti-Tionghoa bisa ditarik kembali ke 1942 ketika Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Kolonial Belanda terusir dari Indonesia (Tan, 1991; Turner & Allen, 2007). Kerusuhan anti-Tionghoa menyebar di Sumatera dan Jawa, banyak pabrik dan toko milik etnis Tionghoa dijarah (Yang, 2001). Sedangkan di Kalimantan, Jepang menangkap beberapa tersangka pemberontakan yang terdiri dari multi-etnis dan membunuh lebih dari seribu etnis Tionghoa, pribumi dan Eropa. Peristiwa itu dikenal sebagai Insiden Pontianak. Namun sebagian besar korban (854 jiwa) merupakan etnis Tionghoa (Purdey, 2006). Banyak yang beranggapan bahwa Jepang mendorong pribumi

untuk menyerang properti milik etnis Tionghoa karena saat itu Jepang sedang berperang dengan Cina.

Era awal kemerdekaan (1945-1965)

Setelah Indonesia merebut kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sentimen anti-Tionghoa masih berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Indonesia memiliki lebih dari 633 suku (Badan Pusat Statistik, 2015). Tapi politisi Indonesia saat itu berpikir suku asing (Tionghoa, Arab, dan Eropa) tidak dianggap sebagai bangsa Indonesia. Bahkan etnis Tionghoa jarang disebut dalam pidato resmi kenegaraan yang membahas tentang perbedaan budaya (Giblin, 2003). Segregasi antara pribumi dan non-pribumi terasa kental dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yaitu pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan “Presiden adalah orang Indonesia asli”, dan pasal 26 yang berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dengan kata lain, warga negara keturunan Tionghoa tidak dianggap sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli, meski saat itu sudah lebih dari 43% etnis Tionghoa lahir di Indonesia (Giblin, 2003). Segregasi tersebut memicu lima kerusuhan anti-Tionghoa di Jawa dan Sumatera dalam dua tahun (1945-1947). Peristiwa tersebut memakan jiwa 3.000 etnis Tionghoa dan menghancurkan ribuan bangunan (Yang, 2001).

Kejadian tersebut melahirkan isu asimilasi versus integrasi (Turner & Allen, 2007). Integrasi mengacu pada identifikasi keindonesiaan tanpa menghilangkan identitas etnis, sedangkan asimilasi merupakan percampuran maksimal dengan masyarakat asli dan melupakan budayanya sendiri (Kim, 2005). Presiden Soekarno memilih asimilasi dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan eceran di wilayah setingkat kabupaten (Mohamad, 2009; Purdey, 2006; Turner & Allen, 2007; Yang, 2001). Di beberapa daerah, militer ikut turun tangan untuk menerapkan regulasi ini dan memaksa etnis Tionghoa untuk pergi. Sekitar 100.000 peranakan yang sudah lama menetap di Indonesia, pergi dari tanah air (Mohamad, 2009).

Era Orde Baru (1965-1998)

Soeharto mengalami rezim Orde baru dengan tragedi berdarah yang memakan ribuan jiwa pribumi dan etnis Tionghoa dalam Operasi Penumpasan G30S PKI. Meski sulit untuk membuktikan apakah motif gerakan ini murni politik atau ada unsur rasialisme, kekerasan tersebut lebih condong ke anti-Tionghoa (Yang 2001). Pada Juli 1967, kabinet presidensial Soeharto mengeluarkan kebijakan yang melarang istilah Orang Tionghoa (istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan Tionghoa tanpa menimbulkan kesan negatif) dan menggantinya dengan Orang Cina yang memiliki tendensi menghina (Aguilar, 2001; Giblin, 2003). Alasan mereka adalah untuk menghilangkan rasa rendah diri masyarakat pribumi dan mengurangi kesombongan etnis Tionghoa (Aguilar, 2001). Sebulan sebelumnya, mereka mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet mengenai Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina untuk mempercepat proses pembauran atau asimilasi (Aguilar, 2001; Chua, 2004; Giblin, 2003; Herlijanto, 2004; Purdey, 2006; Suryadinata,

2005; Tan, 1991). Regulasi tersebut membatasi hak keturunan Tionghoa dalam hampir semua aspek: agama, sosial budaya, pendidikan, media, ekonomi, dan politik.

Aspek agama dan sosial budaya

Berdasarkan Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967, etnis Tionghoa dilarang untuk mengekspresikan agama dan tradisinya di publik (Chua, 2004; Tan, 1991). Melalui Keputusan Presiden No 240 Tahun 1967, keturunan Tionghoa didesak untuk mengganti nama mereka menjadi lebih terdengar Indonesia demi mendorong asimilasi (Chua, 2004; Giblin, 2003; Herlijanto, 2004; Tan, 1991; Turner & Allen, 2007). Meski begitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka memiliki kode khusus yang mengidentifikasikannya sebagai keturunan Tionghoa sehingga pihak otoritas bisa dengan mudah menargetkan mereka untuk diperas (Giblin, 2003; Lindsey, 2005; Turner & Allen, 2007). Misalnya, keturunan Tionghoa harus membayar dua kali lipat lebih mahal dibandingkan pribumi untuk membuat akta kelahiran (Freedman, 2003).

Aspek pendidikan

Pemerintah juga mengatur aspek pendidikan keturunan Tionghoa (Chua, 2004; Giblin, 2003; Herlijanto, 2004; Turner & Allen, 2007). Setelah Menteri Pendidikan dan Budaya menutup sekolah-sekolah yang dibiayai organisasi-organisasi Republik Rakyat Tiongkok, beberapa keturunan Tiongkok kaya diberi izin untuk membangun sekolah-sekolah untuk menampung murid-murid yang berasal dari sekolah yang ditutup. Sekolah tersebut dinamakan sebagai Sekolah Nasional Proyek Khusus pada 1968. Mereka harus menggunakan kurikulum dari pemerintah, dan diperbolehkan mengajarkan bahasa Tiongkok sebagai ekstrakurikuler. Tapi melihat perkembangannya yang cukup pesat, pemerintah menutup sekolah-sekolah tersebut pada 1974 dengan alasan periode transisi telah selesai (Tan, 1991). Meski begitu, peluang etnis Tionghoa untuk melanjutkan studi di universitas negeri sangat terbatas. Mahasiswa keturunan Tionghoa yang masuk universitas negeri hanya 5 sampai 10% dari total mahasiswa yang diterima. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka kuliah di luar negeri atau masuk universitas swasta dengan biaya kuliah yang lebih mahal (Chua, 2004; Giblin, 2003; Tan, 1991; Turner & Allen, 2007).

Aspek media

Pada 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melarang media massa yang menggunakan bahasa dan karakter Tionghoa (Chua, 2004; Tan, 1991). Hal ini mengakibatkan media massa, literatur, dokumen dan simbol Tionghoa menghilang dari publik. Meski begitu, pemerintah mengizinkan satu surat kabar berbahasa Tionghoa, *Harian Indonesia*, untuk tetap terbit di bawah kendali pemerintah (Chua, 2004; Giblin, 2003; Tan, 1991). Pemerintah menggunakan surat kabar tersebut untuk mengkomunikasikan kebijakan mereka pada pembaca keturunan Tionghoa.

Aspek ekonomi

Orde Baru dikuasai orang-orang yang memelihara hubungan dengan segelintir pengusaha kaya keturunan Tionghoa (Chua, 2004). Para penguasa elit menyediakan infrastruktur politik bagi para pengusaha-pengusaha tersebut dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan modal. Presiden Soeharto menginstruksikan mereka untuk menjual 50% saham perusahaannya kepada perusahaan pribumi (Turner & Allen, 2007).

Nasib pengusaha keturunan Tionghoa lain tak seberuntung itu. Bahkan etnis Tionghoa yang bukan pengusaha, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan (Giblin, 2003). Terdapat peraturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa warga beretnis Tionghoa tak bisa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentara, parlemen, dan badan legislatif (Chua, 2004). Maka sebagian besar keturunan Tionghoa bekerja sebagai pengusaha atau profesional (Herlijanto, 2004).

Aspek politik

Sebelum era Orde Baru, terdapat banyak organisasi massa beretnis Tionghoa atau etnis campuran lain. Namun sejak Presiden Soeharto berkuasa, semua organisasi tersebut dilarang, termasuk Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang sebagian besar diikuti oleh wakil berbagai organisasi Tionghoa. Organisasi massa tersebut memperjuangkan integrasi dan menolak asimilasi (Purdey, 2006; Tan, 1991). Tapi karena koneksi mereka dengan Partai Komunis Indonesia, otoritas Orde Baru menganggap Baperki juga memiliki ideologi komunis sehingga dibubarkan (Chua, 2004; Tan, 1991). Mengingat warga keturunan Tionghoa tak bisa bekerja di parlemen dan MPR, mereka tak memiliki suara untuk keputusan-keputusan politik (Turner & Allen, 2007).

Kesadaran sentimen anti-Tionghoa pasca-Orde Baru

Kerusuhan anti-Tionghoa pada Mei 1998 mengguncang Indonesia. Tragedi tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan diskriminasi dan mengubah persepsi terhadap ras Tionghoa. Banyak pribumi yang menyadari bahwa mereka telah memperlakukan keturunan Tionghoa dengan tidak adil dan mulai menerima mereka sebagai warga negara Indonesia (Budiman, 2005). Kesadaran ini tercermin dari serangkaian regulasi anti-diskriminasi yang dikeluarkan presiden baru, B.J. Habibie, seperti Instruksi Presiden yang melarang istilah pribumi dan non-pribumi pada kebijakan resmi pemerintahan dan bisnis, serta memastikan peluang yang sama bagi seluruh warga Indonesia tanpa melihat etnik, agama, atau ras (Purdey, 2006).

Presiden berikutnya periode 1999-2001, Abdurrahman Wahid (Gusdur), mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan aktivitas budaya, sosial, atau keagamaan Tionghoa tak lagi membutuhkan izin (Hoon, 2009; Lindsey, 2005). Presiden Gusdur bahkan menunjuk Kwik Kian Gie yang beretnis Tionghoa sebagai menteri keuangan (Aguilar, 2001). Pada era Megawati sebagai Presiden (2001-2004), banyak dari keturunan Tionghoa yang terlibat dalam partai besar seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Suryadinata, 2001).

Persepsi keturunan Tionghoa juga bergeser setelah kerusuhan Mei 1998. Mereka merasakan perubahan sikap sehingga mulai menggunakan hak mereka dan mendapat perlakuan setara (Budiman, 2005). Kembalinya kepercayaan diri ini terlihat dengan berdirinya tiga partai yang didominasi etnis Tionghoa, yaitu Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti), Partai Pembauran Indonesia, dan Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia (PBI). Muncul pula organisasi-organisasi Tionghoa seperti Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa (INTI),

Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi Indonesia (Gandi), dan Solidaritas Nusa-Bangsa (Suryadinata, 2003).

Presiden berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meneruskan semangat anti diskriminasi ini dengan mengeluarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Indonesia. Disebutkan warga negara Indonesia hanya ada WNI dan WNA tanpa istilah pribumi dan non-pribumi. SBY juga mengeluarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama (2014-2019), beberapa keturunan Tionghoa menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan Indonesia (2014-2016) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016-2019), Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan Indonesia (2015-2016) dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019), dan Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (sejak 2019).

Sentimen anti-Tionghoa masih ada

Awalnya, hubungan antara masyarakat keturunan Tionghoa dan non-Tionghoa berjalan dengan harmonis. Meski begitu, keharmonisan tersebut tidak menghilangkan sentimen negatif terhadap keturunan Tionghoa. Menjelang pemilihan presiden 2014, tersebar *hoax* bahwa salah satu calon presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi), merupakan keturunan Tionghoa dengan nama Wie Jo Koh (Faqih, 2014). Tim kampanye Jokowi langsung menyanggah tuduhan tersebut. Fakta bahwa isu seperti itu perlu untuk disanggah secara publik membuktikan bahwa memiliki darah Tionghoa masih dipandang negatif (Setijadi, 2017).

Ketegangan antara keturunan Tionghoa dan non-Tionghoa kembali muncul pada 2016, ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal sebagai Ahok, terkena kasus penistaan agama. Menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan dirinya untuk putaran kedua, melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam berita di Tempo.co (Akbar, 2018), Ahok berpidato:

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, enggak bisa pilih saya, ya – dibohongi pake surat Al Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu. Ya. Jadi kalo bapak ibu, perasaan, enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Karena itu kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Ya jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak, dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok. Enggak suka sama Ahok. Tapi programnya, gue kalo terima, gue enggak enak dong sama dia, gue utang budi. Jangan. Kalo bapak ibu punya perasaan enggak enak, nanti mati pelan-pelan lho kena stroke.”

Versi edit pidato tersebut tersebar melalui media sosial Buni Yani, disertai kalimat provokatif yang berbunyi “PENISTAAN TERHADAP AGAMA? ‘Bapak ibu (pemilih muslim)... Dibohongi Surat Almaidah 51 (masuk neraka) juga bapak ibu. Dibodohi’. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini” (Akbar, 2018). Hal tersebut memancing kemarahan masyarakat muslim. Massa, termasuk di dalamnya Front

Pembela Islam (FPI) dan organisasi Islam konservatif lainnya, melakukan tiga aksi protes besar yang melumpuhkan Jakarta. Mereka menuntut Ahok untuk dipenjara (Ingketrta, 2018). Pada 2017, pengadilan memutuskan Ahok bersalah dan dipenjara.

Meski berawal dari isu agama, reaksi publik mengarah ke masalah etnis. Pada Agustus 2016, seorang penumpang bus Transjakarta keturunan Tionghoa, Andrew Budikusuma, diserang oleh orang yang tak dikenal. Mereka melontarkan kalimat, “Lu Ahok bukan?” dan “Pilih merem apa sipit?” (Safitri, 2016). Dari ucapan tersebut, mereka tidak membahas agama melainkan etnisitas Budikusuma.

Diskriminasi terhadap Tionghoa tak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tapi juga kaum elit politik. Pada 2016, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan untuk mengembalikan frasa “Presiden ialah orang Indonesia asli” dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6. Ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, “...Presiden dan wakil presiden haruslah pribumi” (Fachrudin, 2016).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 sempat diamandemen pada 2001. Pada ayat 1 pasal tersebut aslinya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”, kemudian diganti menjadi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...”.

Kesimpulan

Kerusuhan Mei 1998 bagaikan puncak gunung es. Kejadian itu merupakan manifestasi dari sentimen anti-Tionghoa yang sudah mengakar selama berabad-abad di Indonesia. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka mengurutkan tingkat ras sebagai berikut: pribumi di paling bawah, Tionghoa di atasnya, dan Eropa dijadikan ras tertinggi. Kesenjangan sosial dan ekonomi tersebut menimbulkan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan bagi pribumi terhadap etnis Tionghoa. Kondisi ini semakin parah saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942-1945. Hasilnya, diskriminasi mewarnai proses pembentukan negara Indonesia di awal kemerdekaan

Pada era Orde Baru, pemerintah menekan etnis Tionghoa melalui serangkaian regulasi Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina yang membuat keturunan Tionghoa semakin diasingkan. Mereka dipaksa untuk berasimilasi dan menghilangkan identitasnya. Namun, meski mereka mengikuti hukum, pemerintah masih menandai mereka (misalnya dengan kode khusus di KTP) sebagai target pemerasan. Stereotip yang ada pun tak membantu. Non-Tionghoa memandang etnis Tionghoa bersifat arogan, eksklusif, dan hanya ingin memperkaya diri. Di sisi lain, etnis Tionghoa memandang non-Tionghoa sebagai orang-orang pemalas, sering minta uang dari mereka dan terkadang dengan ancaman.

Namun, setelah kerusuhan Mei 1998, persepsi non-Tionghoa terhadap keturunan Tionghoa berubah, begitu pula dengan kepercayaan diri etnis Tionghoa. Pemerintahan pasca-Orde Baru mengeluarkan regulasi yang memastikan kesempatan setara bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang etnis, agama, atau rasnya. Alhasil, muncullah berbagai partai dan organisasi beretnis Tionghoa. Perubahan tersebut membawa angin segar bagi kehidupan sosial-politik Indonesia yang lebih sehat.

Sayangnya, sentimen anti-Tionghoa telah mengakar begitu dalam selama berabad-abad, sehingga sulit untuk menghilangkannya hanya dalam beberapa tahun. Isu bernuansa rasisme masih terjadi sampai sekarang. Jika sentimen anti-Tionghoa dibiarkan berkembang, bukan mustahil jika tragedi Mei 1998 terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, F. V. (2001). Citizenship, Inheritance, and the Indigenizing of 'Orang Chinese' in Indonesia. *Positions: East Asia Cultures Critique*, 9(3), 501-533.
- Akbar, C. (2018, 11 Desember). Ahok Bakal Bebas Januari 2019, Begini Kilas Balik Kasusnya. Tempo Online. <https://nasional.tempo.co/read/1154167/ahok-bakal-bebas-januari-2019-begini-kilas-balik-kasusnya>
- Badan Pusat Statistik (2015). Mengulik Data Suku di Indonesia. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Budiman, A. (2005). Potrait of the Chinese in post-Soeharto Indonesia. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 95-104). Singapore: ISEAS Publications.
- Chua, C. (2004). Defining Indonesian Chineseness Under the New Order. *Journal of Contemporary Asia*, 34(4), 465-479.
- Destriana K. (2016, 30 Juli). Salah Paham, 7 Tempat Ibadah Terbakar di Tanjung Balai. Tempo Online. <https://nasional.tempo.co/read/791846/salah-paham-7-tempat-ibadah-terbakar-di-tanjung-balai>
- Elson, R. E. (2005). Constructing the nation: Ethnicity, race, modernity and citizenship in early Indonesian thought. *Asian Ethnicity*, 6(3), 145-160. doi: 10.1080/14631360500226556
- Fachrudin, F. (2016, 4 Oktober). PPP Usulkan Amandemen UUD 1945 Kembalikan Frasa 'Presiden ialah Orang Indonesia Asli'. Kompas Online. <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/04/06472651/ppp.usul.amandemen.uud.1945.kembalikan.frasa.presiden.ialah.orang.indonesia.asli>
- Faqih, M. (2014, 1 Juli). Ini Tiga Black Campaign yang Serang Jokowi. Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/n80t0d/ini-tiga-black-campaign-yang-serang-jokowi>
- Freedman, A. (2003). Political institutions and ethnic Chinese identity in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 439.
- Giblin, S. (2003). Civil society groups overcoming stereotypes? Chinese Indonesian civil society groups in post-Suharto Indonesia. *Asian Ethnicity*, 4(3), 353-368. doi: 10.1080/1343900032000117196
- Himawan, E. M. (2020, 20 Mei). 22 tahun Setelah kerusuhan anti-Cina Mei 1998, riset ungkap prasangka dan trauma masih ada. The Conversation. <https://theconversation.com/22-tahun-setelah-kerusuhan-anti-cina-mei-1998-riset-ungkap-prasangka-dan-trauma-masih-ada-138962>

- Herlijanto, J. (2004). *The May 1998 riots and the emergence of Chinese Indonesians: Social movements in the post-Soeharto era*. Paper presented at the Conference of International Association of Historians of Asia (IAHA), Taiwan.
- Hoon, C. Y. (2009). More than a cultural celebration: the politics of Chinese New Year in post-Suharto Indonesia. *Chinese Southern Diaspora Studies*, 3, 90-105.
- Horowitz, D. L. (2001). *The deadly ethnic riot*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Human Rights Watch (2020). "Indonesia", World Report 2020. *New York: Seven Stories Press*, 276.
- Ingkertia, E. (2018) Chinese Indonesians under Jokowi: Flourishing Yet Unsettling. *Open Journal of Social Sciences*, 6, 84-121. Doi: 10.4236/jss.2018.67009.
- Januru, L. (2016). Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos, dan Kedaulatan Rakyat. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 2
- Kim, Y. Y. (2005). Adapting to a new culture: An integrative communication theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about intercultural communication* (pp. 375-418). London: Sage.
- Kominfo (2019, 7 Mei). Hoaks Pemilu Terus Muncul, Soal Partai Komunis Cina Sampai Peran TNI AD. Kominfo. https://www.kominfo.go.id/content/detail/18564/hoaks-pemilu-terus-muncul-soal-partai-komunis-cina-sampai-peran-tni-ad/0/berita_satker
- Kristiono, M. (2018). Dari Tionghoa ke Tjina: Telaah sejarah terhadap demonisasi etnis Tionghoa di Indonesia. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(19), 34-48. doi: [10.19166/verity.v10i19.1309](https://doi.org/10.19166/verity.v10i19.1309).
- Lindsey, T. (2005). Reconstituting the ethnic Chinese in post-Soeharto Indonesia: Law, racial discrimination, and reform. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 41-76). Singapore: ISEAS Publication.
- Mohamad, G. (Producer). (2009, 19 October 2011). Sebuah catatan lain. <http://web.budayationghoa.net/home/782-sebuah-catatan-lain-goenawan-mohamad>
- Pratama, A. M. (2016, 3 September). Ini Kronologi Pengeroyokan Andrew, yang Diledak Mirip Ahok di Bus Transjakarta. Kompas Online. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/03/15360521/ini.kronologi.pengeroyokan.andrew.yang.diledak.mirip.ahok.di.bus.transjakarta>
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Safitri, I. K. (2016, 31 Agustus). Penumpang Transjakarta Dikeroyok, Polisi Periksa Tiga Saksi. Tempo Online. <https://metro.tempo.co/read/800443/penumpang-transjakarta-dikeroyok-polisi-periksa-tiga-saksi>
- Saputra, K. (2018, 23 Agustus). Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan, Bagaimana Perusak Vihara?. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4178495/pengeluh-volume-azan-dibui-18-bulan-bagaimana-perusak-vihara>
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. *ISEAS Yusof Ishak Institute*.

- Sohutoron, M. (2016, 30 Agustus). Polisi Cari Pemukul Pria di Transjakarta yang Teriak 'Ahok'. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830102627-20-154751/empat-orang-pukuli-pria-di-transjakarta-sambil-teriak-ahok>
- Suryadinata, L. (1997). Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians? In L. Suryadinata (Ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians* (pp. 1-24). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Suryadinata, L. (2001). Chinese politics in post-Suharto's Indonesia: Beyond the ethnic approach? *Asian Survey*, 41(3), 502-524.
- Suryadinata, L. (2003). Kebijakan negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari asimilasi ke multikulturalisme? *Jurnal Antropologi Indonesia*. Doi: 10.7454/ai.v0i71.3464
- Suryadinata, L. (2005). Buddhism and Confucianism in contemporary Indonesia: Recent developments. In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, distorting, forgetting* (pp. 77-94). Singapore: ISEAS Publications.
- Tan, M. G. (1991). The social and cultural dimensions of the role of ethnic Chinese in Indonesian society. *Indonesia*, 113-125.
- Turner, S., & Allen, P. (2007). Chinese Indonesians in a rapidly changing nation: Pressures of ethnicity and identity. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 112-127. doi: 10.1111/j.1467-8373.2007.00334.x
- Yang, T. R. E. (2001). A short history of anti-Chinese riots in Indonesia, 1941-1998. In M. R. Godley & G. J. Lloyd (Eds.), *Perspectives on the Chinese Indonesian* (pp. 41-54). Sydney: Crawford House Publishing.